

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

A.Kohar, Notaris Berkomunikasi, (Bandung: Alumni, 1984)

Amiruddin, et.al, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2003)

Anshori, A. G., Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: Tim UII Press, 2009)

A.P Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: PT Mandar Maju, 1991)

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, (Jakarta: Djambatan, 2003)

Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo S.H., M.Kn, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Jakarta: Kencana, 2020)

Effendi Peranginangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1986)

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980)

Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)

_____, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009)

_____, "Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem," (Jakarta: April - Juni, 2002)

Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

J. Satrio, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)

K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)

Komar Andasasmita, Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya (Bandung: Sumur, 1981)

Mulyoto, Perjanjian; Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012)

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bandung, 2005)

Ngadino. Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia. (Semarang: UPT Penerbit Universitas PGRI Semarang Press, 2019)

Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang, (Semarang: FH Undip, 1988)

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung: Bina Cipta, 1987)

R. Subekti, et.al, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Agraria dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)

R. Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: Alumni, 1982)

Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)

Rudi Indrajaya, et.al, Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020)

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum & Perkembangannya dalam Yurisprudensi, (Jakarta: Reader III, 1991)

Siahaan, M., Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Teori dan Praktek. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2003)

Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

Sudikno, Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2008)

Sutedi, A., Sertifikat Hak Atas Tanah. (Jakarta: Sina Grafika, 2011)

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005)

Urip Santoso, S.H., M.H., Hukum Agraria & Hak-Hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2006)

_____, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Sumur Bandung, 1992)

JURNAL ILMIAH

Anita Afriana, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1, No. 2, 2020

HASIL PENELITIAN

Alfi Irpansyah, “Batalnya Suatu Akta Notaris dalam Kasus Penandatanganan Akta Notaris di Dalam Rutan (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3641 K/Pdt/2001),” Tesis, Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008, hal 21

Juni Wandri, “Tanggungjawab Notaris terhadap Penandatanganan Akta yang Sebahagian Isinya Masih Kosong di Kabupaten Sijunjung.” Tesis, Sumatera Barat: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, hal 13

Risma Marpaung, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.MDN).” Tesis, Medan: Magister Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hal 37

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis
Kehormatan Notaris

